

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

Dalam melakukan setiap penelitian, kajian pustaka mempunyai peran untuk membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar melakukan analisis terhadap objek yang akan diteliti. Sehingga pada dasarnya kajian pustaka mempunyai fungsi untuk menjelaskan hubungan yang akan digunakan untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti. Meninjau kembali baik dari landasan teori yang ada maupun dari penelitian sebelumnya. Bagian ini menguraikan secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian.

2.1.1 Partisipasi Politik

Menurut Kamarulzaman, 2005 Partisipasi berasal dari kata '*Participation*', yang dapat diartikan yaitu ikut berperan dan '*Partisipatie*' yang artinya mengambil bagian dalam suatu kegiatan (dalam Suharyanto, 2014) Partisipasi politik merupakan tindakan yang terorganisir ataupun tidak yang dilakukan dengan suka rela dan kemudian dapat memberikan keberhasilan dan bahkan juga bisa terjadi kegagalan. Bisa dilakukan dengan terus-menerus dan juga kadang-kadang, dengan menggunakan berbagai cara yang sah bahkan tidak sah untuk mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah,

penyelenggaraan pemerintah atau pada saat pemilihan pemimpin politik pada tingkat pusat ataupun daerah lokal.

Menurut Harbert McClosky (dalam Budiardjo, 2013) Partisipasi politik yaitu kegiatan dari warga dengan cara sukarela dimana mereka turut andil dalam mengambil bagian untuk proses pemilihan pemimpin, dengan cara langsung maupun dengan cara tidak langsung, didalam proses pembentukan kebijakan (*Voluntary citizen activities in which they take part in the process of electing leaders, both directly and indirectly, in the policy making process*).

S. Huntington dan J. M. Nelson (dalam Budiardjo, 2013) Partisipasi politik yaitu warga negara yang berkegiatan dan bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Berpartisipasi bisa dilakukan dengan sendiri maupun dengan kelompok, terorganisir, dan sporadis, dengan damai ataupun dengan kekerasan, ilegal ataupun legal, efektif maupun sebaliknya (*citizens who are involved and act as individuals, with a view to influencing government policy making. Participating can be done with groups themselves, organized, and sporadically, peacefully or violently, illegally or legally, effectively or vice versa*).

Partisipasi perempuan sangat berfluktuasi karena perubahan dalam sistem politik era Orde Baru ke era reformasi. Hal ini dalam partisipasi perempuan memberikan efek positif dan negatif, wanita mampu memiliki hubungan kekuasaan dalam lingkup domestik dan wanita memiliki banyak

tanggung jawab (Yuriska, 2015). Partisipasi perempuan mencoba optimal dalam hal kualitas, hal ini terbukti dengan terpilihnya Wakil Bupati Kendal. Agenda politik, yaitu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan sosialisasi kesehatan reproduksi perempuan (Oktaviani Adhi Suciptaningsih, 2011). Partisipasi perempuan dalam politik sangat terbatas, itu karena budaya patriarki dalam pemerintahan maupun swasta. Kriminalisasi politik, korupsi dan pelecehan seksual yang meluas dan memperkuat patriarki. Bahkan masyarakat patriarki menganggap bahwa perempuan sebagai objek pelecehan seksual (Chowdhury, 2009). Perempuan adalah bagian dari orang-orang biasa ditingkat konseptual dan praktis sangat didominasi oleh gagasan atau konsep kelompok yang dominan. Sampai saat ini, perempuan masih memahami bahwa mereka sebagai bagian dari komposisi masyarakat yang beranggapan bahwa mereka lebih tinggi. Dapat dilihat dari pembangunan yang sistematis selama waktu ini sehingga kehidupan politik juga didominasi oleh orang-orang yang secara kultur lebih memiliki kesempatan dan keterbukaan didalam wilayah tersebut dan peran identifikasi dengan masyarakat (Wahid, 2013).

Perempuan harus memilih perempuan yang berpartisipasi dalam politik dan diminta untuk percaya pada perempuan tersebut. Perempuan yang berpartisipasi dalam politik diyakini lebih baik daripada laki-laki pada saat memimpin, dan tidak melakukan penipuan yang dilakukan oleh perempuan, yang berarti disini perempuan lebih jujur dibandingkan laki-laki (Adelina, 2008). Kepentingan politik perempuan lebih cenderung melihat aspek ekonomi, karena mereka kontak sehari-hari dengan fluktuasi harga dan

pasokan bahan pokok. Jadi politik dan ekonomi bagi perempuan tidak dapat dipisahkan (Vandyk Lumiu, 2014). Kemampuan partisipasi perempuan pada saat ini sudah tidak diragukan lagi, bahkan mereka telah mampu memasuki dunia pekerjaan laki-laki dalam berbagai aspek pendidikan, banyak dibudidayakan oleh perempuan dan dengan demikian tidak lagi diasingkan tentang kualitas wawasan yang telah diperoleh melalui sekolah. Terutama di bidang politik sekarang tidak lagi ragu-ragu untuk terjun ke dalamnya (Yopi Pranoto, 2015). Gerakan perempuan yang ada di Indonesia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional, selanjutnya gerakan perempuan Indonesia diakui oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemerdekaan. Begitu pentingnya partai politik dan organisasi lainnya yang sengaja memberikan perhatian besar pada wanita (Mantovani & Santoso, 2015). Partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi beberapa tantangan, baik internal maupun eksternal, serta pemahaman mereka tentang agama (Marhayani, 2017).

Perempuan bukan berdiri sendiri dalam menyikapi politik di Indonesia, banyak hal yang terkait dari beberapa aspek-aspek yang mempengaruhi perempuan. Jadi oleh karena itu harus dilakukan terobosan-terobosan yang komprehensif untuk lebih meningkatkan partisipasi perempuan di rana politik atau dalam segi pejabat politik. Di antara beberapa agenda yang harus diutamakan untuk memperjuangkan kondisi masyarakat serta lebih memantapkan kedudukan perempuan yaitu dimana seputar ekonomi, pendidikan, kesehatan, kekerasan terhadap kaum perempuan harus di

tingkatkan lagi (Anshor, 2008). Partisipasi perempuan dipolitik pada negara-negara berkembang ada kecenderungan yang masih relative rendah di bandingkan oleh para kaum laki-laki. Oleh karena itu mereka banyak terlibat di dalam urusan yang biasanya memang sudah diposisikan sebelumnya yaitu menjadi urusan rumah tangga (Mukarom, 2008). Menurut (Szymoniak, 2011) dan (Ani Purwanti, 2015) tampaknya merusak masalah penting dalam masyarakat modern dan kesetaraan gender karena politik di negara itu tampaknya menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kenyamanan hidup warga. Jika kesetaraan gender di Swedia untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban di semua bidang kehidupan.

Situasinya sangat berbeda, harus ada lebih banyak perempuan dalam posisi kekuasaan dan pengambilan keputusan dari kebenaran (Vianello, 2014). Perempuan memiliki banyak memainkan peran utama sebagai sebuah gerakan perempuan yang maju dalam partisipasi politik dan kesetaraan gender. Semua reformasi yang telah terjadi tidak akan mungkin tanpa perjuangan feminis dan keterampilan advokasi yang kuat berdasarkan yang nyata, terkait dengan realitas pengalaman perempuan (Ennaji, 2016). Keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik di Ghana tidak bisa dipungkiri rendah, karena pemangku kepentingan utama di negara ini adalah perempuan, dan juga memiliki kekuatan memobilisasi besar untuk politisi dari partai politik (Bawa & Sanyare, 2013).

Partisipasi perempuan telah meningkat di Paraguay, baik dalam transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi. Bukti yang sangat maju yaitu lembaga

hukum mengenai reformasi gender ekuitas (pelaksanaan hukum terhadap kekerasan gender). Di bidang politik beberapa organisasi feminis perempuan diperkenalkan ke legislatif. Pandangan kesetaraan yang efektif dengan laki-laki (Patricia & Villagra, 2015)

2.1.2 Discourse

Secara etimologis, kata 'wacana' dimulai pada abad ke-14. Ini diambil dari kata Latin 'discursus' yang berarti 'percakapan' (McArthur, Lam-McArthur & Fontaine 2018). Dalam penggunaan saat ini, istilah ini menggantikannya dengan kuantifier untuk berbagai keperluan, tetapi dalam semua kasus ini terkait dengan bahasa, dan menjelaskannya dalam beberapa cara. wacana didefinisikan secara harfiah sebagai 'pidato atau tulisan serius pada topik tertentu' (Longman Dictionary of Contemporary English, 2019). Dalam pengertian umum ini, ia menggabungkan mode lisan dan tulisan, meskipun, kadang-kadang, itu terbatas pada ucapan yang disebut percakapan serius antara orang. Batasan ini juga tersirat dalam kata saat digunakan sebagai kata kerja. beberapa denotasi kata 'wacana'. Pertama, mengacu pada topik atau jenis bahasa yang digunakan dalam konteks yang pasti. Di sini, dimungkinkan untuk berbicara tentang wacana politik, wacana filosofis dan sejenisnya. Kedua, kata 'wacana' terkadang digunakan untuk membela apa yang diucapkan, sedangkan kata 'teks' digunakan untuk menunjukkan apa yang ditulis. Penting untuk dicatat, bagaimanapun, bahwa perbedaan dalam teks / wacana yang disoroti di sini tidak selalu didefinisikan dengan tajam (Carter & Nunan 1975).

Kedua istilah ini kadang-kadang digunakan secara bergantian dan dalam banyak kasus diperlakukan secara berbeda. Dikotomi 'wacana/teks' sering dikaitkan dengan dikotomi 'proses/produk' masing-masing. Ketiga, ia digunakan untuk membedakannya dari konsep tradisional 'kalimat', unit analisis bahasa tertinggi: wacana mengacu pada urutan bahasa yang muncul secara alami (Nunan, 1993). Wacana tidak terbatas pada pembicara tunggal atau penulis, tetapi dapat menerima pertukaran lisan atau tertulis yang dihasilkan oleh dua orang atau lebih. Ini adalah makna terakhir dari istilah yang merupakan dasar dari pendekatan yang dikenal sebagai analisis wacana (Salzmann & Trask, 2000). Meskipun wacana didefinisikan sebagai bagian yang melampaui hukuman, tidak semua bahasa dapat berada dalam lingkup definisi ini. Kenyataannya, apa yang menjadi ciri wacana jelas bukan sifat supranatural-sentimentalnya, seperti halnya keseluruhannya memiliki koherensi. Untuk lebih eksplisit, wacana adalah unit yang bermakna yang menyampaikan pesan lengkap (Nunan, 1993). Sifat keseluruhan ini tidak dapat dirasakan dengan memeriksa bagian-bagian penyusunnya, 'ada hubungan terstruktur antara bagian-bagian yang menghasilkan sesuatu yang baru' (Silva Villena, 2002).

2.1.3 *Affirmative Action*

Affirmative action merupakan suatu kebijakan yang menciptakan peluang kesempatan untuk perempuan agar turut andil dalam politik. Menurut Carol Lee, 1996 *affirmative action* adalah suatu kualifikasi tertentu suatu dasar pertimbangan untuk kaum perempuan dalam memberikan kesempatan kepada

kelompok minoritas. Pembuatan *affirmative action* bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan gender agar menjadi kesetaraan gender (Hayat, 2015). Menurut Clayton & Faye, 2001 *affirmative action* adalah suatu langkah yang bertujuan untuk kemajuan dalam mencapai kesetaraan dan kesempatan yang bersifat substantif yang tidak hanya formalitas seperti kaum hawa yang merasa dirinya menjadi minoritas dan belum terwakilkan posisi-posisinya (Kurniaty, 2015). Menurut Norris, 2000 bahwa *affirmative action* sebagai kebijakan yang khusus serta bersifat sementara yang bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam sosial, politik, dan ekonomi (Sayuti, 2013). Norris juga berpendapat terdapat tiga upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan:

1. Penerapan dalam sistem pemilu
2. Rekayasa dalam perundang-undangan
3. Partai politik.

Sementara menurut Widyani, 2005 (Kania, 2016) *affirmative action* dibuat bertujuan memberikan peluang kepada kaum hawa yang selama ini telah menjadi kaum minoritas agar dapat mendapatkan kesetaraan yang adil didalam kehidupan. Mullen, 2006 *affirmative action* adalah sesuatu upaya yang dibuat untuk pengembangan secara substantif yang menginginkan kesetaraan bagi kaum perempuan yang sepenuhnya telah menjadi kaum minoritas dan tidak memiliki keterwakilan secara eksplisit serta berharap diperhitungkan berdasarkan ras, jenis kelamin yang acap kali menjadi faktor diskriminasi (Sayuti, 2013). Dan menurut Asshidiqie, 2008 *affirmative action* yaitu suatu

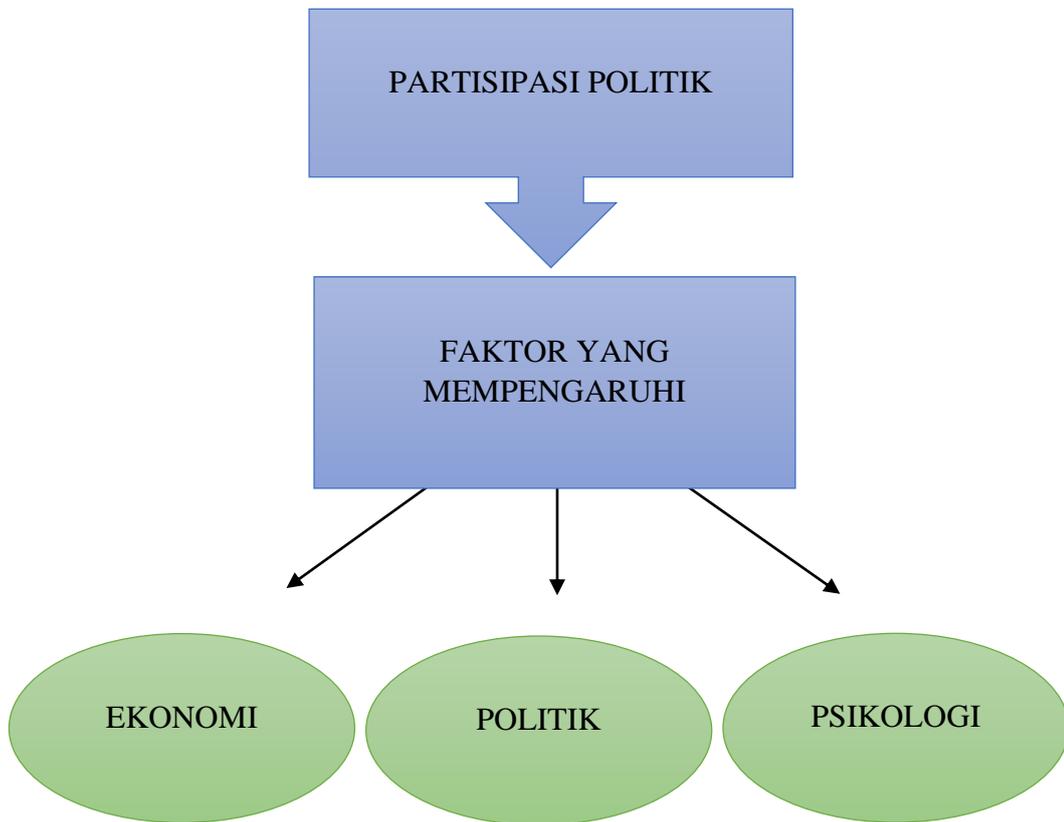
tindakan yang mempunyai sifat khusus dan sementara berguna untuk mempercepat serta mendorong setiap elemen yang ada dalam kelompok masyarakat untuk mengejar kemajuan sehingga terwujudnya pencapaian pada tingkat perkembangan yang sama serta dengan kelompok masyarakat yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan (Yanti & Mh, 2017).

Affirmative action adalah suatu alat untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan agar tetap berada dalam posisi pembuat keputusan, setidaknya 30 persen dari perempuan agar bisa meminimalisir aturan-aturan yang tidak sah menurut Kalliope Migirou, 1999 (dalam Hayat, 2015). Ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Bentuk *affirmative action* adalah kebijakan yang dibuat dalam bentuk kuota. Menurut Azza K, 1999 (dalam Hayat, 2015) Kuota merupakan pemenuhan minimal yang dibuat untuk menyertakan antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. kebijakan *affirmative action* mempunyai tiga sasaran yaitu:

1. Mempunyai sifat yang sementara tetapi masih konsisten, bertujuan untuk melihat ketika sasaran pada kebijakan telah tercapai, maka jika suatu kelompok tersebut terintegrasi maka kebijakan tersebut dapat ditarik kembali.
2. Kebijakan ini dapat menghapuskan ketidaksetaraan gender dalam mencapai suatu kesempatan.
3. Membawa dampak positif pada suatu institusi agar dapat lebih bisa meminimalisir suatu ketidaksetaraan gender, ini dapat memunculkan satu tindakan rasisme dan seksisme pada tempat kerja.

2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1.0 Kerangka Pikir Penelitian



2.3 Definisi Konseptual

Pengertian dari definisi konseptual adalah suatu tahapan yang memaparkan/ menjelaskan mengenai batasan-batasan masalah, dengan begitu agar lebih mempertegas batasan suatu permasalahan yang akan dikaji. Menurut kerangka teori yang dipaparkan diatas, dengan itu maka terdapat beberapa konsep yang saling terkait dari penelitian tersebut:

1. Partisipasi Politik adalah warga negara yang berkegiatan dan bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

2. Discourse didefinisikan secara harfiah sebagai 'pidato atau tulisan serius pada topik tertentu' yang dapat secara tajam mengacu pada jenis bahasa yang digunakan dalam konteks yang pasti.

3. Affirmative Action adalah suatu kualifikasi tertentu suatu dasar pertimbangan untuk kaum perempuan dalam memberikan kesempatan kepada kelompok minoritas.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu definisi yang menghubungkan variabel-variabel berdasarkan karakteristik yang diamati. Terdapat beberapa indikator yang dapat dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia.

1. Partisipasi Politik
2. Faktor yang mempengaruhi
 - a) Ekonomi
 - Modal Finansial
 - Modal Ideologi
 - Modal Kultur
 - Modal Simbol
 - Modal Agama
 - Modal Prestise

- b) Politik
 - Partai Politik
- c) Psikologi
 - Apatis
 - Kurang Percaya Diri.